



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## **BAB II**

### **KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 PENELITIAN TERDAHULU**

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan 3 penelitian terdahulu yang penulis jadikan referensi. Penelitian pertama yang penulis jadikan referensi adalah Analisis Media “Sejauhmana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual (Januari- Juni 2015)” oleh Komnas Perempuan. Komnas Perempuan telah melakukan penelitian terhadap 9 media yaitu Indo Pos, Jakarta Post, Jakarta Globe, Kompas, Koran Sindo, Pos Kota, Republika, Koran Tempo dan Media Indonesia dalam periode Januari- Juni 2015.

Penelitian ini memaparkan data 15 jenis kekerasan seksual yang ditetapkan Komnas Perempuan yaitu perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, intimidasi / serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, kontrol seksual termasuk pemaksaan busana an kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan dan kontrasepsi / sterilisasi paksa. Tetapi dari kesembilan media tersebut paling banyak memuat berita berisi pelecehan seksual (22%), perkosaan (34%), dan perdagangan perempuan untuk tujuan seksual (21%).

Komnas Perempuan menyimpulkan bahwa media masih belum menuliskan berita bagi pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Dalam penulisan berita, terdapat pelanggaran pemenuhan hak korban kekerasan seksual seperti menggunakan diksi yang bias (24,21%), mengungkap identitas korban (23,15%), stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan (15,89%), dan seterusnya. Dari isi berita, media terkesan menggiring pembacanya membuat stereotip dan menghakimi korban.

Penelitian ini banyak membantu peneliti dalam menentukan indikator artikel kriminal bias jender dan *victim blaming*. Indikator yang digunakan yaitu pengukuhan stereotip korban, penggunaan diksi bias, replikasi kekerasan, stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan, penghakiman korban, dan penggunaan narasumber bias. Indikator ini dimaksudkan untuk melindungi korban dari pelanggaran hak korban seperti reviktimisasi, pemberitaan yang mengukuhkan budaya penyangkalan, menyalahkan korban dan menstigmatisasi perempuan (Komnas Perempuan, 2010, h.7).

Dari penjabaran data analisa media yang dilakukan Komnas Perempuan terhadap 9 media, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa media di Indonesia yang masih bias jender dalam pemberitaannya. Ini merupakan suatu fenomena global yang mempunyai dampak terhadap masyarakat Indonesia. Berangkat dari hal tersebut, timbul keinginan peneliti untuk melakukan penelitian resepsi pembaca terhadap pemberitaan kriminalitas kekerasan perempuan.

Selanjutnya peneliti menggunakan referensi penelitian “Perempuan sebagai Presiden di Mata Media dan Khalayak” oleh Billy K Sarwono. Peneliti banyak terbantu dari penelitian ini karena memiliki konsep yang sama yaitu representasi perempuan dalam media massa serta metode analisis resepsi. Beliau selaku dosen di Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia banyak membuat penelitian tentang perempuan dan media.

Dari penelitian ini, peneliti mendapatkan data tentang bias gender yang dilakukan media terhadap politisi perempuan serta metode *encoding decoding* Stuart Hall. Resepsi setiap audiens berbeda bervariasi dari latar belakang, ideologi, pengalaman dan berbagai faktor lainnya.

Sebagai contoh dalam penelitian tentang *Women Watching Television* yang dilakukan Andrea Press dalam Sarwono (2013, h.42) dengan menganalisis resepsi isi media, kelas sosial dan interpretasi khalayak. Andrea menemukan bahwa pemaknaan antara perempuan pekerja dan perempuan kelas menengah berbeda. Hasilnya, perempuan kelas pekerja sadar bahwa penggambaran televisi tidak realistis. Sementara perempuan kelas menengah cenderung menganggap perbuatan diskriminatif terhadap perempuan dalam media adalah hal yang normal.

Ini merupakan penemuan yang menarik dari hasil penelitian analisis resepsi yang berbasis media dan khalayak perempuan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan topik yang peneliti teliti, sehingga peneliti banyak menggunakan referensi dari penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga menjabarkan langkah-langkah penelitian dari latar belakang, kerangka berpikir teoritis, metode penelitian sampai hasil penelitian dari analisis resepsi.

Penelitian Sarwono menjabarkan indikator latar belakang narasumber dari hasil axial *coding* seperti dibesarkan pada masa Soekarno atau Soeharto, pendapat tentang sosok ibunda, pembagian tugas anak laki-laki dan perempuan, pendapat tentang profesi ibu rumah tangga, dan pendapat tentang peran perempuan yang ideal.

Peneliti terinspirasi dari penelitian Sarwono untuk melihat masa lalu narasumber dari segi pendapat tentang peran perempuan yang ideal, pendapat tentang profesi ibu rumah tangga dan pembagian tugas domestik anak laki-laki dan perempuan.

Penelitian ini menggunakan konsep khalayak aktif, studi resepsi, tipologi khalayak, kajian media dalam perspektif feminis, jurnalisme berperspektif gender, gender dan feminisme. Peneliti mempelajari konsep-konsep yang digunakan Sarwono yang berkaitan dengan penelitian peneliti.

Peneliti juga menggunakan penelitian “Pemaknaan Khalayak terhadap Pemberitaan Begal Motor di Warta Kota (Periode Januari-Maret 2015)” oleh Adindityo Achita Putra. Adindityo menggunakan konsep pemaknaan khalayak analisis resepsi oleh Stuart Hall yang membagi audiens menjadi tiga yaitu dominan, negosiasi dan oposisi.

Adindityo menggunakan konsep media massa dan konstruksi realitas, isi media dan efek traumatis bagi khalayak, karakteristik pers (surat kabar) dan konsep begal. Adindityo menggunakan dua teori yaitu teori konstruksi sosial oleh Peter L. Berger & Thomas Luckmann) dan teori pemaknaan khalayak oleh Stuart Hall.

Terdapat tiga proses konstruksi sosial yang dilakukan khalayak dalam memproses makna yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Penelitian Adindyto hanya mendalami proses internalisasi yaitu proses dimana individu mengidentifikasi diri dengan organisasi dan lembaga sosial yang ia ikuti (Bungin, 2007, h.194).

Adindyto dalam penelitiannya menggunakan paradigma konstruktivistik dengan metode kualitatif. Hal yang sama dengan yang peneliti gunakan yaitu paradigma konstruktivistik dimana peneliti percaya bahwa setiap individu mencari pemahaman terhadap dunia dari tempat dia hidup dan bekerja (Creswell, 2009, h.8).

Teknik pengumpulan data yang digunakan Adindyto adalah dengan wawancara mendalam dimana keempat informan diberi dua belas artikel pemberitaan begal di Koran Warta Kota. Pemaknaan artikel dibagi menjadi lima bagian yaitu pemaknaan berita, judul, pembuka, isi berita, dan penutup. Kelima hal tersebut yang menjadi tolak ukur posisi khalayak dominan, negosiasi atau oposisi.

Peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data yang sama dimana informan akan diberi artikel berita kriminalitas kekerasan perempuan *Tribunnews.com* yang terindikasi melakukan *victim blaming*. Peneliti mempelajari teknik pengambilan data dan bagaimana Adindyto menganalisis hasil wawancara mendalam informan setelah diberi 12 artikel.

M U L T I M E D I A  
N U S A N T A R A

## **2.2 KONSEP DAN TEORI**

### **2.2.1 KHALAYAK PEREMPUAN**

McQuail (2011, h.144) dalam bukunya mendefinisikan khalayak sebagai “sekelompok pendengar atau penonton yang memiliki perhatian, reseptif, tetapi relatif pasif yang terkumpul dalam latar yang kurang lebih bersifat publik”

Holmes (2012, h.235) berpendapat bahwa khalayak adalah pengguna aktif media massa selama pesan yang disiarkan dipandang berguna. Dalam studi David Morley dalam Holmes (2012, h.236-237) audiens aktif didefinisikan dalam proses interaksinya yang lebih pada teks daripada medium. Hall membagi khalayak aktif memaknai pesan dengan negosiasi, oposisi atau dominan.

Virginia Nightingale (dikutip dalam Holmes, 2012, h.237) mendefinisikan audiens sebagai satu kelompok yang didefinisikan oleh penggunaan umum atas tanda dan kode yang sama. Audiens bukanlah wadah yang pasif melainkan dibentuk dalam proses yang sama sebagaimana interaksi audiens-teks (Holmes, 2012, h.237).

Biocca dalam McQuail (2011, h.164-165) mengatakan terdapat lima versi berbeda makna dan konsep dari aktivitas khalayak yaitu khalayak semakin aktif ketika diberi banyak pilihan dan diskriminasi dalam konten media, khalayak dianggap sebagai konsumen yang memiliki kepentingan pribadi, khalayak terlibat aktif mengelola informasi kognitif yang didapat, khalayak kebal terhadap pengaruh dan membuat batasan adanya pembelajaran atau pengaruh, khalayak terlibat secara aktif dalam menggunakan media.

Perempuan dalam KBBI (KBBI Kemdikbud, 2016) diartikan sebagai “manusia yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui”. Atau bisa dikatakan perempuan sebagai penggolongan salah satu jenis kelamin (Muthali'in, dikutip dalam Sarwono, 2013, h.48). Dapat disimpulkan khalayak perempuan adalah sekelompok perempuan yang secara aktif menggunakan media massa. Mereka memiliki perhatian dan berinteraksi pada teks media massa.

Dalam penelitian ini, informan yang diwawancarai merupakan perempuan yang secara aktif menggunakan media massa, memiliki perhatian dan reseptif terhadap berita kriminal.

## **2.2.2 BUDAYA PATRIARKI DAN BIAS JENDER**

Perilaku *victim blaming* terhadap perempuan seringkali dikaitkan dengan budaya patriarki. Definisi patriarki pun berkembang sesuai dengan perkembangan jaman.

Weber (dikutip dalam Walby, 1989, h.214) mendefinisikan patriarki sebagai sistem pemerintahan dimana pria dominan di masyarakat karena posisinya sebagai kepala keluarga. Sylvia Walby (1989, h.214) dalam penelitiannya berjudul “*Theorising Patriarchy*” mendefinisikan patriarki sebagai sistem dalam struktur sosial dan praktikal dimana pria mendominasi, menindas dan mengeksploitasi perempuan.

Mengacu dari penelitian Cain, Khanam dan Nahar (1979, h.406) dalam “*Class, Patriarchy, and Women's Work in Bangladesh*”, patriarki didefinisikan

sebagai suatu set rangkaian hubungan sosial dengan materi yang memungkinkan pria mendominasi wanita. Patriarki yang terjadi seperti kontrol laki-laki dalam properti, pendapatan, dan pekerjaan perempuan.

Sunarto (2009, h.33) menyatakan “jender merupakan istilah yang lekat dengan laki-laki dan perempuan dalam menjalankan perannya di masyarakat. Peran yang dimaksud ini bukan dalam hal jenis kelamin atau biologis namun perannya secara feminitas dan maskulinitas di dalam masyarakat”.

Kata jender pertama kali digunakan sebagai pembeda segala sesuatu dalam masyarakat dengan perbedaan seksual. Pembeda tersebut bersifat alami namun melalui konstruksi sosial, semakin berkembangnya kehidupan manusia, akhirnya definisi tersebut mulai bergeser. Akhirnya munculah konstruksi pembagian posisi dan peran yang terus berlangsung dalam masyarakat yang semakin disosialisasikan dan diperkuat dengan instusi sampai terbentuk menjadi sebuah ideologi (Sarwono, 2013, h.49).

Konstruksi sifat feminin dan maskulin dalam masyarakat berdampak pada terbentuknya peran yang harus dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Perempuan dengan sifat femininnya ditempatkan berperan di sektor domestik sementara laki-laki dengan sifat maskulin diberikan kewajiban budaya untuk berperan di sektor publik (Sarwono, 2013, h.50).

Pemilihan sifat dan peran tersebut menciptakan adanya dominasi dan subordinasi. Semakin lama dan semakin diterapkannya anggapan ini menghasilkan label yang baku, nilai-nilai dan norma dalam masyarakat. Seperti seorang

perempuan yang berkarakter feminin dan laki-laki bersifat maskulin (Sarwono, 2013, h.50).

Sarwono (2013, h.51) dalam bukunya menyatakan:

Ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan, terutama pada perempuan, misalnya marginalisasi perempuan, subordinasi perempuan, stereotip dan pelabelan negatif sekaligus perlakuan diskriminatif terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan, dan beban kerja lebih panjang dan lebih banyak.

Media massa memiliki peran penting dalam meneruskan dominasi patriarki dengan menggambarkan perempuan sebagai objek yang pasif di media (Sarwono, 2013, h.130).

Terbukti dari pemberitaan media massa yang didominasi oleh laki-laki menunjukkan konstruksi realitas dalam kehidupan sosial dimana laki-laki lebih mendominasi di masyarakat terutama ruang publik. Tayangan media massa setiap saat mencitrakan bahwa kaum laki-laki identik dengan kekuasaan terhadap perempuan, dan ruang publik perempuan adalah konsumsi laki-laki atau perempuan di media massa adalah bagian dari kerelaan kekuasaan laki-laki (Bungin, 2006, h.354).

Sebagai contoh tentang pemberitaan bias gender media massa mengenai politisi perempuan. Norris dalam Sarwono (2013, h.16) membahas bias media terkait posisi perempuan seperti, media kurang serius memberitakan politikus perempuan dibandingkan laki-laki, jumlah peliputan kampanye politikus perempuan lebih sedikit dibanding laki-laki, media lebih memfokuskan penampilan fisik dan kehidupan keluarga politikus perempuan, politikus perempuan lebih

sering diberitakan dalam rubrik *style page* bukan di halaman utama, peliputan politikus perempuan lebih banyak dilakukan jurnalis perempuan daripada laki-laki, politikus perempuan dianggap sebagai agen perubahan karena mempunyai perspektif yang berbeda dari laki-laki, isu yang diangkat dalam peliputan politikus perempuan umumnya tentang feminitas seperti aborsi, kesehatan perempuan, kekerasan perempuan.

### **2.2.3 MEDIA BARU**

McQuail (2012, h.43) dalam bukunya mendefinisikan media baru sebagai bentuk konten yang menggabungkan multimedia pesan seperti gambar, tulisan, video melalui internet. Media ini memiliki karakteristik interaktif, kehadiran sosial, kekayaan media, otonomi, unsur bermain-main, privasi dan personalisasi.

Media baru memiliki keunggulan dimana ia dapat mengirim pesan secara cepat kepada banyak publik dengan sasaran lebih spesifik. Pesan dapat dikirimkan dengan banyak akses, pertukaran, berita dan informasi yang tidak henti-hentinya (Cutlip, 2006, h.289). Perubahan secara besar ini membuat pola penggunaan media berubah.

Tribunnews merupakan anak dari perusahaan media Kompas Gramedia yang berkantor di Jakarta. Selain online, tribun juga hadir dalam versi e-paper yang dapat diakses melalui aplikasi Android dan IOS. Tetapi e-paper dan online tidaklah sama. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada *Tribunnews.com* (Tribunnews.com, 2018)

Situs berita ini menyajikan berita-berita nasional, regional, internasional, olahraga, ekonomi dan bisnis, serta seleb dan lifestyle (Tribunnews.com, 2018, para. 1). Setiap harinya, berita *Tribunnews.com* dipasok oleh reporter yang bertugas di Jakarta, 28 jaringan koran daerah atau Tribun Network dan 500 wartawan di 22 kota penting di Indonesia. *Tribunnews.com* mempunyai lebih dari 20 situs berita daerah Tribun Network (Tribunnews.com, 2018, para.3).

*Tribunnews.com* menduduki peringkat ke delapan sebagai situs yang paling banyak dikunjungi di Indonesia dengan total kunjungan sebanyak 235.59 juta (Similarweb, 2018). Banyaknya kunjungan dalam situs *Tribunnews.com* menjadikannya sebagai situs berita berpengaruh bagi masyarakat Indonesia.

#### **2.2.4 VICTIM BLAMING**

Sebagaimana diartikan oleh Schwartz & Legget (1999, dikutip dalam Hayes, dkk., 2013, h.203), *victim blaming* adalah tindakan memandang korban dan menemukan perilaku korban yang dianggap bertanggung jawab atas kejadian yang menimpanya. Tindakan kekerasan lebih sering menimpa perempuan ketimbang laki-laki sehingga lebih tinggi kemungkinan perempuan diberitakan dengan cara *victim blaming* terutama dalam pemberitaan kriminal (Hayes, dkk., 2013, h.203).

Eigenburg & Garland (dikutip dalam Hayes, dkk., 2013, h.203) mengatakan masyarakat seringkali memandang terjadinya korban disebabkan kesalahan perempuan (Eigenburg & Garland, 2008). Konstruksi wanita sebagai korban terjadi karena pandangan patriarki yang menganggap perempuan lebih lemah daripada laki-laki sehingga memudahkan menjadi korban kekerasan terutama kekerasan

seksual (Edwards et al (2011); Eigenburg & Garland (2008); Ryan (2011), dikutip dalam Hayes, dkk., 2013, h.207).

Macrae & Shepherd (1989, dikutip dalam Hayes, dkk., 2013, h.207) mengatakan tindakan pria lebih mudah melakukan *victim blaming* terhadap perempuan dipengaruhi oleh pemikiran tradisional, stereotip gender tentang perempuan yang baik dan tidak. Perempuan baik akan mendapat perlakuan yang baik, sementara perempuan tidak baik maka akan diperlakukan tidak baik. Sehingga bila perempuan mendapat kekerasan seksual dianggap perempuan tersebut tidak baik dan pantas menerimanya. Weiss (2009, dikutip dalam Hayes, dkk., 2013, h.207) mengatakan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan pria juga cenderung dijustifikasi.

*Victim blaming* berdampak negatif bagi korbannya. Riset yang dilakukan oleh Ullman (1996, dikutip dalam Grubb & Turner, 2012, h.444) menunjukkan bahwa respon negatif dari masyarakat terhadap korban berdampak pada perilaku menyalahkan diri korban. Media yang menyebarkan *victim blaming* dalam pemberitaannya dapat berdampak buruk terhadap korban.

*Victim blaming* juga muncul dipengaruhi beberapa faktor seperti penampilan fisik (Tieger, 1981; Deitz, Litman & Bentley, 1984), provokatif (Scroggs, 1976), kegiatan seksual korban (L'Armand & Pepitone, 1982; Cann, Calhoun, & Selby, 1979), perlawanan korban (VanWie & Gross, 1995; Wyer Bodenhausen, & Gorman, 1985; Yescavage, 1999) (dikutip dalam Grubb & Harrower, 2008, h.397).

Teori yang dapat menjelaskan fenomena *victim blaming* adalah *Just World Theory* (Lerner & Matthews, 1967 ; Kleinke & Meyer, 1990) dan *Defensive Attribution Hypothesis* ( Shaver, 1970; Cann , Calhoun & Selby, 1979; Kanekar & Vaz, 1988; Thornton, Ryckman & Robbins , 1982; Muller, Caldwell, & Hunter, 1994) (dikutip dalam Grubb & Harrower, 2008, h.397).

Teori *Just World* berpendapat bahwa masyarakat mempunyai kebutuhan untuk mempercayai bahwa dunia adalah tempat yang indah dan perilaku yang menyimpang akan mendapat ganjarannya. Perspektif ini membantu kita merasa aman berada di dunia selama kita tidak berbuat buruk. Mereka meyakini bahwa setiap orang mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Perbuatan baik akan dibalas dengan kejadian baik, sebaliknya perbuatan buruk akan berakibat hal buruk seperti tertimpa musibah (Grubb & Harrower, 2008, h.397).

Teori *Defensive Attribution Hypothesis* menjelaskan bahwa tingkat kesamaan seseorang terhadap korban mempengaruhi cara pandang bersalah atau tidaknya korban. Semakin seseorang mempunyai persamaan dengan korban atau kemungkinan terkena musibah yang sama dengan korban maka semakin ia tidak menyalahkan korban. Sebaliknya, semakin seseorang berbeda dengan korban semakin tinggi kemungkinan menyalahkan korban. Hal ini merupakan mekanisme pertahanan diri agar tidak disalahkan saat mengalami kejadian yang sama dengan korban (Grubb & Harrower, 2008, h.398).

Dikutip dari video Remotivi (Remotivi, 2016) berjudul “*Victim Blaming* dalam Berita Kriminal” menjelaskan ciri-ciri dari berita kriminal *victim blaming*

sebagai kasus sensasional yang dinarasikan dengan bahasa bombastis dan dalam format sebab dan akibat. Berita tidak hanya menjelaskan aksi kriminal tetapi juga alasan pemicunya. Perempuan digambarkan sebagai pemicu kekerasan dan seringkali dilegitimasi.

Pemberitaan *victim blaming* dapat kita lihat di beberapa media di Indonesia. Dikutip dari video Remotivi (Remotivi, 2016) berjudul “*Victim Blaming* dalam Berita Kriminal”, program TRANSTV berjudul “Harta Tahta Wanita” menggambarkan perempuan sebagai pemicu kekerasan. Dalam promo program Harta Tahta Wanita dikatakan sebagai drama reka ulang untuk menyikap sebab dan akibat kejadian aslinya.

Program ini menceritakan sebab dan akibat terjadinya aksi kriminal. Biasanya diawali dengan penggambaran sosok perempuan bermoral buruk seperti memakai pakaian minim, berselingkuh, tidak patuh pada suami. Kemudian musibah pun terjadi yaitu aksi kriminal seperti pembunuhan, perampokan yang dilakukan oleh pelaku. Program ini juga menampilkan wawancara dengan pelaku yang menjelaskan kronologi dari perspektif pelaku.

Program “Harta Tahta Wanita” melakukan *victim blaming* dari penggambaran perempuan sebagai pemicu terjadinya aksi kriminal. Program ini menayangkan aksi kriminal dari perspektif pelaku yang melakukan pembelaan dengan membebaskan alasan pada perilaku korban. Akibatnya, musibah yang menimpa korban dianggap sebagai balasan dari perilaku korban yang dianggap

bersalah. Korban dianggap pantas untuk menerima aksi kriminal karena perilaku korban.

### **2.2.5 BERITA KRIMINAL**

Yunus (2010, h.46-47) mengatakan “berita adalah laporan tercepat dengan fakta dan ulasan yang menarik dan penting dan atau kedua-duanya untuk masyarakat”. Berita memiliki banyak jenis salah satunya adalah berita kriminal.

Muda (2008, h.36-37) dalam bukunya mendefinisikan berita kriminal sebagai uraian peristiwa berupa fakta atau pendapat yang mengandung nilai berita tentang kejahatan. Berita kriminal menayangkan informasi mengenai kejadian kriminal seperti kejahatan, kecelakaan, kebakaran dan orang hilang. Tayangan ini dapat dikemas dalam format berita (*news*) atau laporan mendalam (*indepth report*) yang mengupas suatu kasus disertai tips-tips untuk mengantisipasi kejahatan.

Berita yang paling banyak diminati masyarakat adalah tentang bencana dan kriminal. Masyarakat mempunyai kebutuhan dasar manusia tentang keselamatan kaumnya. Informasi ini bisa didapat dari berita bencana dan kriminal, sehingga tidak heran kedua berita tersebut sangat diminati masyarakat. Tayangan berita juga tidak boleh menyiarkan korban-korban manusia yang sadis. Ini merupakan etika dalam penyiaran agar pemirsa tidak memiliki rasa takut atau trauma yang mendalam (Muda, 2008, h.36-37).

Berita kriminal pada umumnya dikategorikan menjadi tiga yaitu *hard news* (berita berat) yaitu berita tentang peristiwa penting bagi masyarakat, individu, kelompok maupun organisasi, *soft news* (berita ringan) atau *features* adalah berita

yang tidak terikat pada aktualitas tetapi memiliki daya tarik tersendiri. Berita ringan mengeksplor dan membahas hal-hal yang unik dan menakjubkan , *investigative reports* (laporan penyelidikan) yaitu berita eksklusif. Dibutuhkan penyelidikan mendalam untuk mendapatkan data dan informasi yang terkadang bersifat *confidential* atau eksklusif (Muda, 2008, h.40-43).

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa berita kriminal adalah laporan peristiwa yang mengandung unsur kejahatan , kekerasan, kecelakaan bisa dikemas dalam bentuk *hardnews*, *softnews* ataupun *investigative reports*.

Peneliti menggunakan berita kriminal dari *Tribunnews.com* sebagai objek yang diteliti. Peneliti memilih *Tribunnews.com* dengan alasan tingginya akses masyarakat Indonesia yang menjadikan *Tribunnews.com* sebagai website peringkat ke delapan paling banyak diakses di Indonesia dengan total kunjungan 235.59 juta (Similarweb.com, 2018). Semakin tinggi akses berdampak pada semakin besar dampak penyebaran informasi pada masyarakat.

Peneliti menentukan berita kriminalitas kekerasan perempuan yang terindikasi melakukan *victim blaming* berdasarkan indikator dari Komnas Perempuan yaitu pengukuhan stereotip korban, penggunaan diksi bias, replikasi kekerasan, stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan, penghakiman korban, dan penggunaan narasumber bias.

## **2.2.6 TEORI PEMAKNAAN KHALAYAK (*ENCODING-DECODING* STUART HALL)**

Teori pemaknaan khalayak atau studi resepsi pertama kali diciptakan oleh Stuart Hall, seorang peneliti yang mengembangkan banyak teori di bidang ilmu pengetahuan. Studi resepsi atau pemaknaan khalayak mempelajari bagaimana audiens mengurai pesan dan media mengkonstruksikan pesan.

Tujuan dari studi pemaknaan khalayak adalah untuk menemukan pemahaman dan pembentukan makna dengan penerima. Teori ini berasumsi bahwa pesan media selalu terbuka dan bermakna banyak (polisemi). Penerima menafsirkan pesan dari media berdasarkan konteks dan budaya si penerima (McQuail, 2011, h.80).

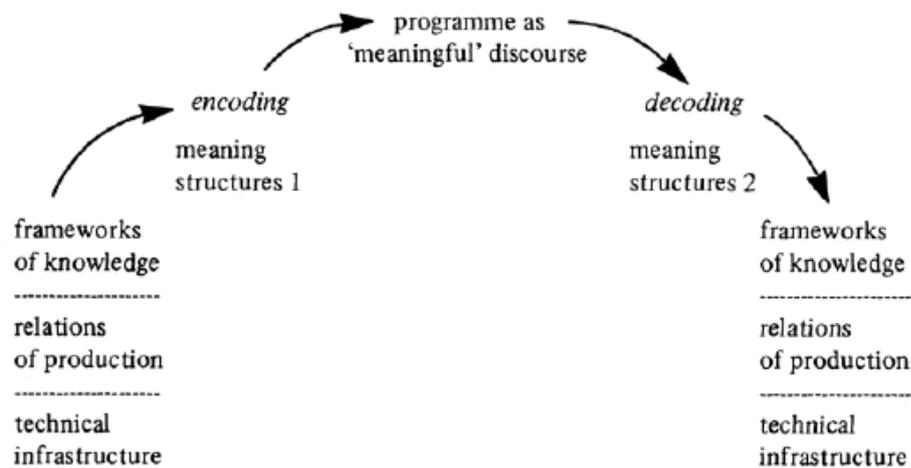
Teori ini mengatakan bahwa pesan mengandung kode simbolis yang dimaknakan berbeda oleh setiap orang. Komunikator dapat menolak atau menafsirkan kembali pesan yang diterima. Komunikator menafsirkan pesan berdasarkan ideologi dan memanipulasi bahasa berdasarkan sudut pandang mereka. Komunikator juga dapat menolak menerima pesan sebagaimana dikirimkan. Pemaknaan oposisi atau penafsiran diferensial adalah ketika komunikator menolak pengaruh ideologi dari pesan yang dikirimkan dan menafsirkan sesuai pengalaman dan pandangan mereka sendiri (McQuail, 2011, h.80).

Komunikator pada dasarnya menginginkan pemahaman atau makna dalam pesannya disukai atau dominan. Karakteristik teks yang bersifat polisemi atau bermakna banyak membuat komunikator sangat mungkin membuat penafsiran alternatif. Mereka dapat menolak atau menyalah artikan beberapa hal dalam pesan

yang mengakibatkan terciptanya penafsiran alternatif atau negoisasi makna dari yang awalnya ditentukan. Tidak menutup kemungkinan juga khalayak menafsirkan pesan berlawanan dari penafsiran dominan (Baran & Davis ,2010, h.304).

Dalam bukunya, McQuail (2011, h.81) menjelaskan prinsip utama dari teori ini adalah keragaman makna dari konten media, keberadaan komunitas yang memiliki keragaman penafsiran, dan dominasi penerima dalam menentukan makna.

Gambar 2.1 Model *Encoding-Decoding*



Sumber: Hall, 1980

Beberapa pesan dirangkai dengan pemaknaan yang mapan dan panduan bagi penerima untuk mengartikannya. Khalayak seringkali menafsirkan pesan berdasarkan ide dan pengalaman mereka (McQuail, 2011, h.80-81).

Tabel di atas menjelaskan proses komunikasi pemaknaan pesan dari kedua pihak, *encoding* dan *decoding*. Terdapat kemungkinan *encoder* dan *decoder* tidak simetris dalam artian adanya salah pengertian dalam pertukaran informasi (Hall, 1980, h.120). Hall (1980, h.124) menjelaskan membaca tidak hanya

mengidentifikasi dan mengurai simbol tetapi terdapat unsur subjektifitas dalam penafsiran makna.

Penafsiran pesan dapat sama sekali berbeda dari penafsiran yang dimaksudkan di awal. Komunikator dapat membaca simbol tersirat atauembali makna pesan awal (McQuail, 2011, h.81).

Hall (1980, h.125-127) mengidentifikasi tiga posisi khalayak dalam mengkonstruksikan pesan yaitu posisi dominan- hegemoni: khalayak menerima makna yang dimaksudkan oleh komunikan secara keseluruhan. Komunikasi ini termasuk transparan sempurna. Posisi Negoisasi: khalayak mungkin menyalah artikan beberapa bagian pesan dan cukup memahami apa yang disampaikan. Terdapat unsur adaptif dan oposisi pada khalayak dalam menerima pesan. Posisi oposisi: khalayak memahami pesan secara literal dan mengartikan pesan bertolak belakang dari yang dimaksudkan.

Teori ini memiliki beberapa kelebihan yaitu berfokus pada individu dalam komunikasi massa, menghargai kemampuan khalayak media, teks bersifat polisemi atau bermakna banyak, mempelajari perilaku khalayak dalam menafsirkan pesan, mempelajari bagaimana media digunakan dalam konteks sehari-hari secara mendalam (Baran & Davis, 2010, h.304).

Teori ini juga memiliki beberapa kekurangan yaitu berdasarkan interpretasi subjektif khalayak, tidak dapat menunjukkan keberadaan atau ketiadaan efek, menggunakan riset kualitatif untuk menjelaskan sebab-akibat , berorientasi pada mikro tetapi mencoba untuk lebih makroskopik (Baran & Davis, 2010, h.304).

## **2.3 PENERAPAN TEORI PEMAKNAAN KHAYALAK PADA BERITA KRIMINAL**

Terdapat 4 indikator yang peneliti gunakan dalam menentukan resepsi narasumber terhadap pemberitaan kriminalitas kekerasan perempuan. Peneliti menggunakan 3 dari 7 indikator pemenuhan hak korban yang digunakan Komnas Perempuan pada penelitian “Sejauhmana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual? (Januari-Juni 2015)” yaitu stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan, pengukuhan stereotip korban dan penghakiman korban.

Indikator tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam penelitian Komnas Perempuan yang berjudul “Menakar Pengawal Reformasi, Kecenderungan Media Mengintegrasikan Perspektif Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual”. Komnas Perempuan (2010, h.7) menjelaskan “liputan media tentang kekerasan seksual harus memastikan bahwa proses reviktimisasi, atau membuat korban kembali menjadi korban, tidak terjadi akibat pemberitaan yang mengukuhkan budaya penyangkalan, menyalahkan korban, dan menstigmatisasi perempuan”. Indikator ini dimaksudkan untuk melindungi korban dari pelanggaran hak korban di media seperti reviktimisasi, pemberitaan yang mengukuhkan budaya penyangkalan, menyalahkan korban dan menstigmatisasi perempuan

Peneliti merasa indikator tersebut cocok digunakan untuk mengidentifikasi posisi pembaca dalam memaknai pemberitaan kriminalitas kekerasan perempuan dan dalam menemukan ada tidaknya *victim blaming* dalam berita. Indikator yang

peneliti gunakan adalah judul, stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan, penghakiman korban dan stereotip perempuan. Keempat indikator tersebut menjadi tolak ukur pemaknaan artikel oleh narasumber.

Menurut Putra (2010, h.170), judul dan kalimat pertama berfungsi untuk menarik perhatian dan rasa ingin tahu pembaca. Syah (2011, h.22-25) berpendapat judul merupakan intisari dari teras berita dan harus mencerminkan isi berita. Judul yang bermasalah biasanya menyangkut kesalahan bahasa seperti pemilihan diksi yang bombastis, sensasional, tidak sopan dan provokatif.

Judul berperan penting untuk menarik minat pembaca dan mencerminkan isi berita. Narasumber dapat memaknai judul artikel dalam tiga posisi yaitu dominan dimana narasumber setuju dan merasa tertarik dengan judul, negosiasi dimana narasumber mempunyai cukup memahami pesan tetapi memiliki sedikit pemahaman yang berbeda dengan judul, dan oposisi dimana narasumber menolak atau tidak setuju dengan judul.

Stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan menjadi indikator yang digunakan Komnas Perempuan “Sejauhmana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual? (Januari-Juni 2015)” dalam mempertimbangkan pemenuhan hak korban di media. Dari 9 media yang diteliti yaitu Indopos, Jakarta Post, Jakarta Globe, Kompas, Koran Sindo, Pos Kota, Republika, Tempo dan Media Indonesia terdapat 15,89% pelanggaran pemenuhan korban dalam stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan.

Stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan didefinisikan dalam Komnas Perempuan (2010, h.7) dengan mengaitkan tindak kekerasan dengan cara berpakaian korban dan / atau keberadaannya saat kekerasan itu terjadi.

Terdapat tiga posisi dalam pemaknaan khalayak yaitu dominan, oposisi, dan negosiasi. Posisi dominan yaitu saat narasumber menerima pesan yang disampaikan komunikator secara keseluruhan. Narasumber mempunyai pandangan yang sama dengan yang disampaikan media, dalam hal ini melakukan stigma terhadap korban sebagai pemicu kekerasan. Posisi negosiasi, dimana narasumber menyalah artikan beberapa bagian pesan dari stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan. Posisi oposisi dimana narasumber menolak makna yang disampaikan media yaitu menolak stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan.

Dari penelitian Komnas Perempuan “Sejauhmana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual? (Januari-Juni 2015)” terhadap 9 media di Indonesia, terdapat 8.4% pemberitaan bernada menghakimi korban. Penghakiman pada perempuan menurut Komnas Perempuan (2010, h.7) adalah “dituduh melanggar kebijakan yang diskriminatif atas nama moralitas sehingga ia kehilangan hak atas privasi dan juga hak atas praduga tidak bersalah”.

Dalam penelitian ini, terdapat tiga posisi pemaknaan narasumber yaitu dominan, dimana narasumber mempunyai pandangan yang sama dengan media dalam penghakiman korban. Posisi negosiasi yaitu narasumber cukup memahami pesan tetapi memaknai beberapa bagian pesan dengan keliru dalam penghakiman

korban. Dan posisi oposisi dimana narasumber memiliki interpretasi yang berbeda dari yang disampaikan media yaitu penghakiman korban.

Toni (dikutip dalam Astuti & Simangunsong, 2012, h.814-815) menjelaskan perempuan di media digambarkan secara konsisten sebagai sosok yang dikomodifikasikan dan distereotipkan dalam baik dan buruk. Perempuan ideal digambarkan sebagai istri pasif, mengabdikan pada laki-laki, penyayang dan keibuan, terpaku pada rumah. Perempuan menyimpang digambarkan mendominasi laki-laki dan tidak mengurus keluarga.

Media juga menggambarkan stereotip perempuan dari segi kecantikan. Perempuan yang cantik didefinisikan oleh industri periklanan dan televisi seperti kaki yang panjang, putih, tubuh yang tidak gemuk. Perempuan dikonstruksikan dalam sinetron, iklan dan berita sebagai sosok emosional, cerewet, cengeng (Remotivi, 2015). Stereotip perempuan dijelaskan Komnas Perempuan (2010, h.7) sebagai “penguatan stereotip tentang korban terkait perkawinan atau latar belakang seksual korban”.

Syah (2011, h.35) mengatakan Aliran Jurnalisme Damai menghimbau media menghilangkan stereotip, label, mengurangi pemakaian kata sifat tidak terukur, tidak menggunakan kata-kata berkonotatif atau bermakna ganda, tidak hiperbola dan lainnya.

Narasumber memaknai artikel melalui tiga posisi yaitu dominan dimana narasumber menerima stereotip perempuan yang digambarkan di media dan setuju. Posisi negosiasi dimana narasumber cukup memahami pesan tetapi menyalah

artikan beberapa bagian pesan dalam stereotip perempuan. Posisi oposisi dimana narasumber menolak segala stereotip perempuan di media seperti perempuan sebagai sosok penurut, terpaksa pada rumah, dan pasif.

## 2.4 ALUR PENELITIAN

Penelitian berjudul “*Victim Blaming* dalam Pemberitaan *Tribunnews.com*: Studi Resepsi Pembaca Perempuan Pekerja terhadap Pemberitaan Kriminalitas Kekerasan Perempuan” ini diawali dengan terdapatnya isu *victim blaming* yang merupakan isu global yang terdapat di Indonesia namun masih sedikit yang mengangkat dan menanggapi dengan serius. Kurangnya pembahasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai *victim blaming* menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat awam mengenai isu tersebut.

Langkah awal untuk menyelesaikan suatu permasalahan adalah pemahaman dan kesadaran terhadap isu yang tersebut. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menanggapi isu *victim blaming* dengan mencari tau pemahaman perempuan pekerja terhadap isu tersebut.

Peneliti menggunakan teori pemaknaan khalayak oleh Stuart Hall untuk memahami posisi audiens dalam memaknai berita kriminalitas kekerasan perempuan. Hall membagi pemaknaan audiens dalam tiga kelompok yaitu pemaknaan dominan, negosiasi dan oposisi. Audiens di sini merupakan perempuan pekerja sektor formal dengan minimum pendidikan S1. Penelitian ini akan menjawab bagaimana posisi perempuan pekerja terhadap pemberitaan kriminalitas kekerasan perempuan di *Tribunnews.com*.

Bagan 2.1 Alur Penelitian

